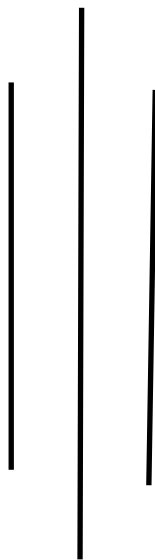




**RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029**

**KECAMATAN SIANTAR BARAT
KOTA PEMATANGSIANTAR**



**PEMERINTAH KOTA
PEMATANGSIANTAR
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siantar Barat Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Renstra Kecamatan Siantar Barat Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Siantar Barat dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat secara terarah, terukur, dan berkesinambungan.

Penyusunan Renstra ini dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di wilayah Kecamatan Siantar Barat. Melalui pendekatan ini diharapkan Renstra yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta mampu menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan di tingkat kecamatan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih terdapat berbagai keterbatasan, baik dari segi data maupun analisis. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan dokumen ini pada masa mendatang.

Akhirnya, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan dukungan dalam proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Siantar Barat Tahun 2025–2029 ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang optimal, serta pembangunan kecamatan yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Pematangsiantar, September 2025
CAMAT SIANTAR BARAT



HERWAN A.R SARAGIH, SH
PENATA TK I
NIP. 19711225 2000604 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	6
2.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	6
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	22
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	24
3.1. Tujuan dan Sasaran	24
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan	25
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	27
4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	27
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan	46
BAB V PENUTUP	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah). Perencanaan strategis menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan. Renstra Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Tahun 2025-2029 ini merupakan hasil proses politik, yakni bermula dari rumusan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, tetapi dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program dan kegiatan Kecamatan Siantar Barat. Sejalan dengan itu, muatan Renstra Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Tahun 2025-2029 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kota Pematangsiantar. Oleh karena itu matriks rencana program dan

kegiatan pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Renja (Rencana Kerja) Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar selama satu Tahun Anggaran.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut :

1. Renstra Tahun 2025-2029 ini berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan merupakan pelaksanaan program-program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematangsiantar Tahun 2025-2029 dan sekaligus mempertimbangkan azas keberlanjutan dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam Renstra Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Tahun 2017-2022;
2. Renstra Tahun 2025-2029 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada RPJM Provinsi Sumatera Barat dan RPJMD Kota Pematangsiantar;
3. Renstra Tahun 2025-2029 ini dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) SKPD pada setiap tahunnya selama kurun waktu perencanaan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD;

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar disusun atas dasar :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);
15. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pematangsiantar Tahun 2025-2029;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siantar Barat Tahun 2025-2029 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan Strategi dan Kebijakan Umum serta tahapan Program Kegiatan Strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan Daerah Kecamatan Siantar Barat dibidang pelayanan pada masyarakat, disusun sesuai kebutuhan masyarakat.

Dokumen Renstra Kecamatan Siantar Barat Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan maksud:

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun rencana tahunan (Renja) Kecamatan Siantar Barat;
2. Untuk menentukan Sasaran dan Arah Kebijakan, Program Serta Prioritas Kecamatan Siantar Barat dalam Jangka Menengah;
3. Untuk dasar penilaian kinerja Kecamatan Siantar Barat yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Siantar Barat Tahun 2025–2029 adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
2. Memberikan arah dan pedoman dalam mencapai tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan;
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi instansi terkait monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan gambaran umum penyusunan rancangan awal renstra Perangkat Daerah mulai dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II Memuat informasi terhadap tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah dan capaian kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan perangkat daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Telaah terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan terhadap renstra K/L, telaahan terhadap RTRW dan KLHS.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah, sasaran renstra perangkat daerah dan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah 5 tahun mendatang.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Perangkat Daerah dan Proyeksi Pendanaannya serta mengemukakan indikator kinerja

perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SIANTAR BARAT, PERMASALAHAN,
DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

1. Camat

Di dalam Pasal 5 Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2017, Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Meyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan dan prasarana fasilitas pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kota yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari Wali Kota;
- b. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan.

2. Sekretaris Camat

Sekretariat kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi pemerintahan kecamatan.

Penjabaran tugas Sekretaris Kecamatan meliputi :

- a. Penyusunan rencana/program, pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya;
- b. Pengurusan administrasi keuangan kecamatan;
- c. Pengurusan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga kecamatan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Camat dibantu oleh:

a. Sub Bagian Program dan Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinir perencanaan, penyusunan, evaluasi dan pelaporan program serta pengelolaan administrasi keuangan.

Penjabaran tugas Sub Bagian Program dan Keuangan meliputi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana, program kerja dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b. Menghimpun, mengolah dan menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan kecamatan;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan kecamatan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan kecamatan;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan kecamatan yang meliputi penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi anggaran serta perbendaharaan;
- f. Mengkoordinasikan dan menyusun serta mengendalikan pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran di lingkungan kecamatan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris camat sesuai bidang tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan serta menyelenggarakan program

kepegawaian, pengembangan dan pemberdayaan pegawai di lingkungan kecamatan.

Penjabaran tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi:

- a. Mengelola administrasi surat menyurat, penggandaan dan pengarsipan tata laksana rumah tangga kecamatan;
- b. Mengelola administrasi perlengkapan yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian/pemanfaatan, pemeliharaan dan inventarisasi barang perlengkapan/perbekalan rumah tangga kecamatan;
- c. Melaksanakan koordinasi kegiatan rumah tangga kecamatan serta membina hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan di lingkungan kecamatan;
- d. Mengelola administrasi dan pembinaan kepegawaian termasuk perencanaan kebutuhan dan pengembangan kepegawaian di lingkungan kecamatan;
- e. Menyusun perencanaan kebutuhan dan pengembangan/diklat kepegawaian di lingkungan kecamatan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris camat sesuai bidang tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah kecamatan.

Penjabaran tugas Kepala Seksi Pemerintahan meliputi :

- a. Menyusun program dan membina penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan kelurahan;
- b. Menyusun program dan melaksanakan pembinaan administrasi kependudukan;
- c. Menyusun program dan melaksanakan pembinaan sosial politik, Ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa;
- d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- e. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah kelurahan;

- g. Melaksanakan tugas lain yang dan fungsinya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan ketahanan dan sosial budaya masyarakat, pembangunan fisik, perekonomian rakyat, produksi, distribusi, lingkungan hidup dan pemanfaatan teknologi tepat guna dan sumber daya lainnya serta kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan di wilayah kecamatan.

Penjabaran tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga meliputi :

- a. Merumuskan dan menyusun rencana program, kegiatan dan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan yang meliputi ketahanan sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi rakyat, teknologi tepat guna dan sumber daya alam;
- b. Menyusun program dan pembinaan perekonomian masyarakat kelurahan, produksi dan distribusi;
- c. Menyusun program dan pembinaan lingkungan hidup;
- d. Menyusun program, melaksanakan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- e. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olahraga;
- f. Melakukan pembinaan dan pelayanan terhadap masyarakat, memberikan petunjuk, mengawasi pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan yang meliputi ketahanan social budaya masyarakat, usaha ekonomi rakyat, teknologi tepat guna dan sumber daya alam;
- g. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan;
- h. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- i. Melaksanakan, membina dan mengawasi serta mengevaluasi keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;

- j. Melaksanakan kegiatan-kegiatan olahraga daerah, dan mengutus masyarakat yang berprestasi menurut bidang keolahragaan masing-masing;
- k. Memfasilitasi kegiatan olahraga yang berada di lingkungan kecamatan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Keamanan, Ketertiban Dan Kebersihan

Seksi Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keamanan dan ketertiban umum, penyapuan jalan, pengumpulan sampah, pembabatan dan pengikisan rumput di beram-beram jalan, pembersihan selokan/parit-parit dan penggalian sedimen di jalan-jalan atau gang-gang di luar jalan arteri dan kolektor serta mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang diperbantukan di kecamatan.

Penjabaran tugas Kepala Seksi Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan meliputi:

- a. Menyusun program dan menyelenggarakan pembinaan keamanan, ketertiban dan kebersihan;
- b. Menyusun program dan menyelenggarakan pembinaan Polisi Pamong Praja;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan, ketertiban dan kebersihan;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan penyapuan jalan, pengumpulan sampah, pembabatan dan pengikisan rumput di berm-berm jalan, pembersihan selokan/parit-parit dan penggalian sedimen di jalan-jalan atau gang-gang diluar jalan arteri dan kolektor dan menempatkannya pada TPSS/kontainer;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

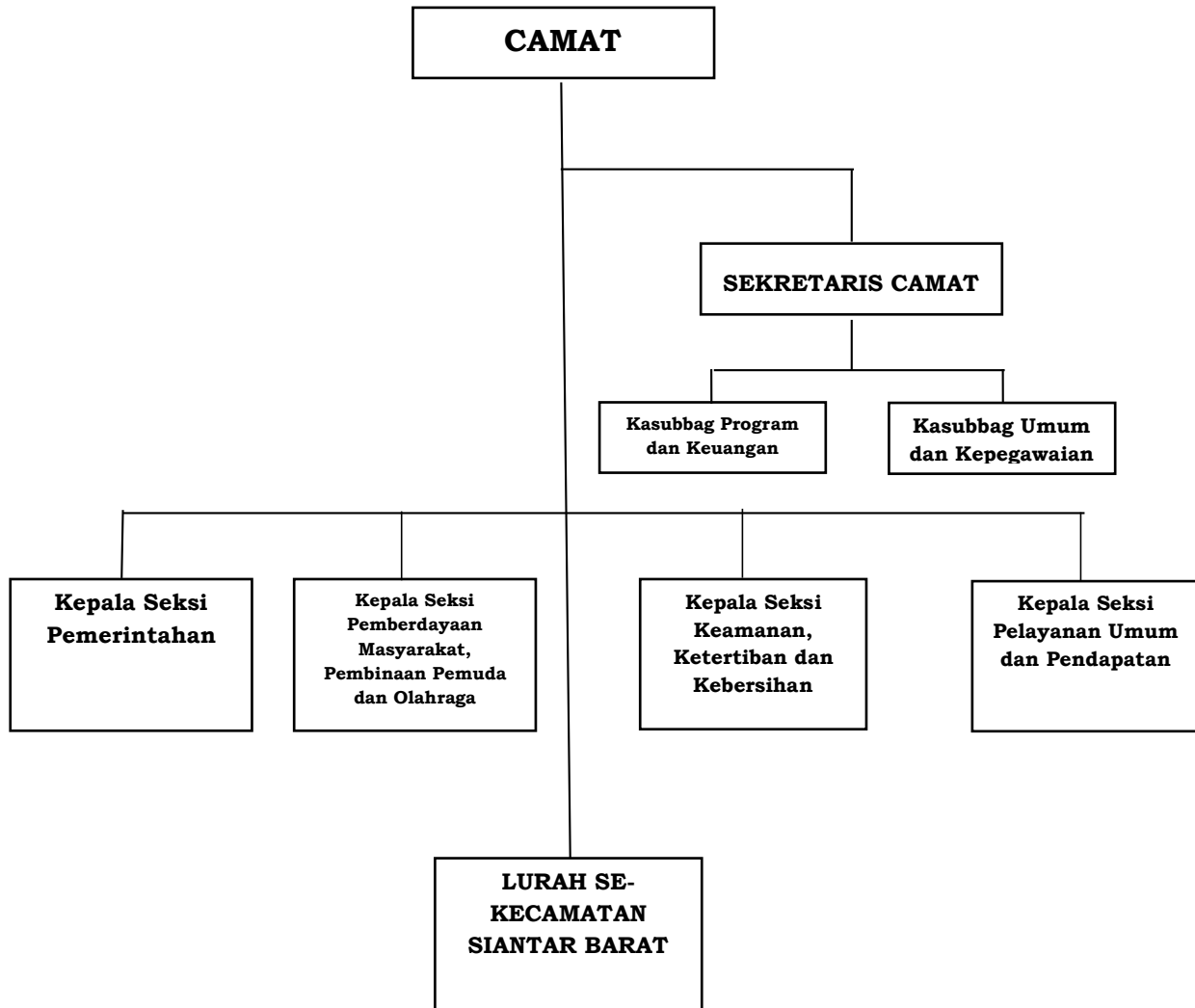
6. Seksi Pelayanan Umum dan Pendapatan

Seksi Pelayanan Umum dan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan dan melakukan pelayanan umum, mendata dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

Penjabaran tugas Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Pendapatan meliputi:

- a. Menyusun program, membina pelayanan dan bantuan sosial, dan melaksanakan pembinaan masyarakat;
- b. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- c. Melaporkan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- d. Melaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penagihan PBB serta retribusi ruang terbuka;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pendapatan;
- h. Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi terhadap potensi dan sumber-sumber pendapatan daerah di wilayah kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Gambar 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN SIANTAR BARAT



2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Kondisi Kepegawaian

Susunan kepegawaian di Kecamatan Siantar Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Susunan Kepegawaian Kecamatan Siantar Barat Berdasarkan Golongan

No	Jabatan / Eselon	Jumlah	Pangkat / Golongan Ruang	Pendidikan Formal	Jenis Kelamin	
					Perempuan	Laki-laki
1	Camat / Eselon III	1	Penata TK I, III/d	S-1	-	1
2	Sekretaris Camat / IV.a	1	Penata, III/c	S-2	-	1
3	Lurah	8	Penata TK I, III/d	S-1		2
			Penata, III/c	S-1	1	4
			Penata Muda TK I, III/b		1	

No	Jabatan / Eselon	Jumlah	Pangkat / Golongan Ruang	Pendidikan Formal	Jenis Kelamin	
					Perempuan	Laki-laki
4	Kasi Pemerintahan / Eselon IV.a	1	Penata TK I, III/d	SMA	1	
5	Kasi Pelum dan Pendapatan / Eselon IV.a	1	Penata TK I, III/d	S-1	-	1
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga / Eselon IV.a	1	Penata TK I, III/d	S-1	-	1
7	Kasi Ketentraman, Ketertiban dan Kebersihan / Eselon IV.a	1	Penata TK I, III/d	S-1	-	1
8	Kasubbag Program dan Keuangan / Eselon IV.b	1	Penata TK I, III/d	S-1	1	-
9	Kasubbag Umum dan Kepegawaian / Eselon IV.b	1	Penata Muda TK I, III/b	S-1	1	-
10	Sekretaris Lurah	8	Penata/III.c	S-2	1	-
			Penata/III.c	S-1	1	
			Penata Muda TK I, III/b	S-1	1	
			Penata Muda TK I, III/b	S-1		5
11	Kasi Pemerintahan dan Ketertiban Umum / Eselon IV.b	8	Penata TK, I/III d	S-1	4	
			Penata, III/c	S-1	1	
			Penata, III/c	SMA		1
			Penata Muda TK I, III/b	S-1	1	1
12	Kasi Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum / Eselon IV.b	7	Penata TK, I/III d	S-1	4	1
			Penata Muda TK I, III/b	S-1	-	2
13	Kasi Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat / Eselon IV.b	6	Penata TK, I/III d	S-1	2	
			Penata, III/c	S-1	2	
			Penata Muda TK I, III/b	S-1	2	
14	Analisis Data dan Informasi	1	Penata Muda Tingkat I, III/b	S-1	1	
15	Analisis Kinerja	1	Penata /IIIc	S-1	1	
16	Pengawas Lapangan, Petugas Kebersihan, Jalan, Saluran dan Selokan	1	Penata Muda, III/a	S-1	1	
	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1	Pengatur TK I, II/d	SMA	1	
17	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1	Pengatur/IIc	SMA		1
	Pengadministrasi Umum	1	Penata Muda, III/a	SMA		1
18	Pengadministrasi Umum	1	Pengatur Muda TK I/IIc	SMA		1
19	Pengadministrasian Kepegawaian	1	Pengatur Muda/IIa	SMA		1
20	Pengadministrasi Keuangan	1	Pengatur TK I, II/d	SMA		1
21	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1	Penata Muda, III/a	SMA		1
	Pengadministrasi Pemerintahan	1	Penata Muda TK I, III/b	SMA	1	

No	Jabatan / Eselon	Jumlah	Pangkat / Golongan Ruang	Pendidikan Formal	Jenis Kelamin	
					Perempuan	Laki-laki
22	Pengadministrasi Pemerintahan	1	Pengatur TK I, II/d	SMA	1	
	Pengadministrasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	1	Pengatur TK I, II/d	SMA	1	
23	Petugas Keamanan	1	Pengatur Muda Tk I, II/b	SMP	1	
24	Petugas keamanan	1	Pengatur, II/c	SMA		1
25	Pengadministrasi Program dan Kerjasama	1	Pengatur TK I, II/d	SMA		1
26	Pengadministrasi Program dan Kerjasama	1	Pengatur Muda Tk I, II/b	SMA		1
25	Pengadministrasian Perkantoran	13	V	SMA	9	4
26	Pengelola layanan Operasional	1	VII	D-3	1	
27	Penata layanan Operasional	4	IX	S-1	2	2
28	THL	86		Tidak Tamat SD	2	-
				SD	17	2
				SMP	15	5
				SMA	24	19
				S1	2	-
Jumlah		166			104	62

Sumber: Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Siantar Barat

Untuk kondisi kepegawaian di lingkungan Kecamatan Siantar Barat untuk jabatan pelaksana dan jabatan struktural masih banyak yang kosong. Untuk kelurahan Simarito dan kelurahan Bantan masih ada jabatan struktural yang kosong. Kemudian untuk disiplin pegawai dilingkungan Kecamatan Siantar Barat masih ada pegawai yang melanggar ketentuan jam kerja dan ketentuan pakaian dinas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan surat edaran Walikota Nomor 800/2988/V/2022.

2. Sarana dan Prasarana Kecamatan

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Siantar Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Kecamatan Siantar Barat

No	Jenis Aset	Ukuran/Jumlah	Kondisi	
			Baik (unit)	Buruk (unit)
1	Tanah Bangunan Kantor Kecamatan	854 m ²	1	
2	Tanah Bangunan Kantor Kelurahan Dwikora	169 m ²	1	
3	Tanah Bangunan Kantor Kelurahan Proklamasi	600 m ²	1	
4	Tanah Bangunan Kantor Kelurahan Bantan	490 m ²	1	
5	Tanah Bangunan Kantor Kelurahan Simarito	421 m ²	1	

No	Jenis Aset	Ukuran/Jumlah	Kondisi	
			Baik (unit)	Buruk (unit)
6	Tanah Bangunan Kantor Kelurahan Banjar	254 m ²	1	
7	Tanah Bangunan Kantor Kelurahan Teladan	223 m ²	1	
8	Tanah Bangunan Kantor Kelurahan Sipinggol-pinggol	120 m ²	1	
9	Tanah Bangunan Kantor Kelurahan Timbang Galung	149 m ²	1	
10	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kecamatan	9 (854 m ²)	9	
11	Kendaraan Roda 4	2	2	
12	Kendaraan Roda 2	3	3	
13	Kendaraan Roda 3/Betor	3	3	
14	Generator Busa	1	1	
15	P.C Unit	4	4	
16	Laptop	13	13	
17	Note Book	3	3	
18	Printer	41	41	
19	Layar Film/Projector	1	1	
20	LCD Projector/Infocus	1	1	
21	Layar Proyektor	1	1	
22	Handtruck Trolley Plastic	3	3	
23	Transportable Water Pump	1	1	
24	Tenda	3	3	
25	Alat Olahraga lainnya	1	1	
26	Mesin Potong Rumput	3	3	
27	Mesin Absensi	1	1	
28	Sofa	2	2	
29	Kursi Putar	3	3	
30	Kursi Biasa	47	47	
31	Kursi Plastik	2	2	
32	Papan Visual	1	1	
33	Papan Nama Instansi	1	1	
34	Papan Pengumuman	1	1	
35	White Board	7	7	
36	Meja Kerja Kayu	20	20	
37	Meja Rapat	2	2	
38	Meja ½ Biro	11	11	
39	Meja Komputer	2	2	
40	AC Window	1	1	
41	AC Split	2	2	
42	Kipas Angin	4	4	

No	Jenis Aset	Ukuran/Jumlah	Kondisi	
			Baik (unit)	Buruk (unit)
43	Televisi	1	1	
44	Radio	1	1	
45	Soundsystem	2	2	
46	Loudspeker	1	1	
47	Handycam	1	1	
48	Pesawat Telepone	1	1	
49	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	1	
50	Lemari Kayu	2	2	
51	Filling Cabinet	10	10	
52	Brand Kas	14	14	

Sumber: Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Siantar Barat

Untuk sarana dan prasarana di Kecamatan Siantar Barat sebenarnya masih kurang memadai, seperti gedung dan bangunan kantor, peralatan komputer dan mebel. Untuk bangunan kantor lurah di lingkungan kecamatan Siantar Barat masih banyak yang tidak layak seperti kantor lurah Dwikora, kantor lurah Teladan, kantor lurah Sipinggol-pingol dan kantor lurah Banjar. Sementara untuk kantor Lurah Proklamasi dan kantor lurah Bantan masih membutuhkan pemeliharaan gedung. Tetapi masih dibutuhkan waktu yang lama untuk melakukan rehabilitas gedung tersebut dikarenakan keterbatasan anggaran yang ada di Kecamatan Siantar Barat. Untuk peralatan dan mesin berupa komputer dan laptop masih banyak di bagian dan seksi-seksi yang di kecamatan maupun kelurahan tidak memiliki komputer maupun laptop yang dapat menghambat kinerja di kecamatan Siantar Barat.

2.1.3 Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Siantar Barat
Kota Pematangsiantar (Tabel T-C.23)

No	Indikator Kinerja Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian Pada Tahun Ke-		
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				70	80	85	70	80,94	92,17	100%	101,17%	108,44%
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	-	-	-	-	B	B	-	B	B	-	-	100%
3	Persentase Pembersihan dan Pengangkutan Sampah Lingkungan sampai ke TPSS	-	-	-	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%
4	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%
5	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	100%

Sumber: Berdasarkan Data Capaian IKU Kecamatan Siantar Barat Tahun 2022-2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Kecamatan Siantar Barat periode 2022-2024 adalah sebagai berikut :

- Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2022 terealisasi sebesar 70% sehingga menunjukkan rasio capaian sebesar 100%. Pada Tahun 2023 terealisasi sebesar 80,94% sehingga menunjukkan rasio capaian sebesar 101,17% dan pada Tahun 2024 dengan capaian sebesar 92,17 sehingga menunjukkan persentase rasio capaian sebesar 108,44%;
- Nilai Akip Perangkat Daerah pada Tahun 2024 sudah memenuhi target yaitu dengan Predikat B atau nilai sebesar 64,64 dengan persentase sebesar 101,00%;
- Persentase Pembersihan dan Pengangkutan Sampah Lingkungan sampai ke TPSS pada Tahun 2024 sudah terlaksana 100% sehingga menunjukkan persentase capaian sebesar 100%;
- Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di Wilayah Kecamatan pada Tahun 2024 sudah terlaksana 100% sehingga menunjukkan persentase capaian sebesar 100%;
- Jumlah Inovasi Perangkat Daerah pada Tahun 2024 sudah tercapai sebanyak 1 (satu) Inovasi sehingga rasio capaian sebesar 100%.

Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Kecamatan Siantar Barat, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Kecamatan Siantar Barat melalui pelaksanaan Renstra Kecamatan Siantar Barat periode perencanaan sebelumnya.

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Siantar Barat
Kota Pematangsiantar Tahun 2023-2024 (Tabel TC 2.4)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Pengelolaan Persampahan	1.530.084.500	1.461.927.260	1.518.772.800	1.454.894.204	99,26%	99,52%	-4,45%	-4,21%
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	727.817.739	690.830.048	726.925.276	687.140.700	99,88%	99,47%	-5,08%	-5,47%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.046.789.901	8.336.117.496	7.889.849.002	7.704.686.377	98,05%	92,43%	3,60%	-2,35%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.706.646.751	1.643.506.376	1.006.630.250	1.542.189.500	58,98%	93,84%	-3,70%	53,20%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	165.013.848	192.334.831	164.945.746	191.794.000	99,96%	99,72%	16,56%	16,28%
Jumlah	12.176.352.739	12.324.716.011	11.307.123.074	11.580.704.781	92,86%	93,96%	1,22%	2,42%

Pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa target Anggaran pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 12.176.352.739,- dengan realisasi capaian sebesar Rp. 11.307.123.074,- sehingga menghasilkan rasio sebesar 92,86%. Pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 12.324.716.011,- dengan realisasi capaian sebesar Rp. 11.580.704.781,- dengan rasio sebesar 93,96%. Hal ini menandakan bahwa perencanaan anggaran telah dilaksanakan dengan efektif dan sesuai dengan kebutuhan program prioritas kecamatan.

Dari sisi pertumbuhan anggaran, terjadi kenaikan rata-rata sebesar 1,22% per tahun. Sementara itu, pertumbuhan realisasi anggaran juga meningkat rata-rata 2,42%. Kenaikan ini menggambarkan adanya konsistensi dalam peningkatan kapasitas fiskal dan penyerapan anggaran kecamatan dari tahun ke tahun.

Secara programatik, beberapa hal penting yang dapat dicermati adalah:

1. Program Pengelolaan Persampahan mengalami peningkatan baik dalam alokasi maupun realisasi anggaran, dengan rasio realisasi mencapai 99,52%, menunjukkan efektivitas pengelolaan kegiatan kebersihan wilayah.
2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat menunjukkan rasio realisasi mencapai 99,47%.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan rasio realisasi sebesar 92,43%.
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan memiliki rasio realisasi sangat tinggi (sekitar 93,84%), menggambarkan keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan di tingkat kelurahan.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum memiliki rasio realisasi sangat tinggi (sekitar 99,72%).

Secara keseluruhan, kinerja keuangan Kecamatan Siantar Barat selama periode 2023–2024 tergolong efisien dan konsisten, dengan tingkat penyerapan anggaran yang baik dan tren peningkatan yang positif.

2.1.4 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah

Kelompok sasaran dari pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan adalah pihak-pihak yang menjadi penerima manfaat langsung maupun tidak langsung dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan selama periode Tahun 2025–2029. Adapun kelompok sasaran tersebut meliputi:

1. Masyarakat Kecamatan

Seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah Kecamatan sebagai penerima manfaat utama dari penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan wilayah, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

2. Pemerintah Kelurahan / Desa

Aparatur pemerintah kelurahan atau desa yang memperoleh pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi dari Kecamatan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayahnya.

3. Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kota

Perangkat daerah lain yang menjadi mitra kerja Kecamatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan lintas sektor, terutama dalam mendukung capaian sasaran pembangunan daerah.

4. Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga-lembaga yang tumbuh di tengah masyarakat seperti LPM, PKK, Karang Taruna, RT/RW, dan organisasi sosial lainnya yang berperan aktif dalam mendukung partisipasi masyarakat terhadap pembangunan.

5. Pelaku Usaha dan UMKM di Wilayah Kecamatan

Pelaku ekonomi lokal yang menjadi sasaran dalam upaya penguatan ekonomi masyarakat melalui fasilitasi, pembinaan, dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah.

6. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Pemuda

Figur-figur masyarakat yang berperan strategis dalam menjaga ketentraman, ketertiban, serta meningkatkan partisipasi sosial dan budaya di wilayah Kecamatan.

7. Lembaga Pendidikan dan Kesehatan

Satuan pendidikan dan fasilitas kesehatan yang menjadi mitra dalam penyelenggaraan program pelayanan dasar masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan.

8. Kelompok Masyarakat Rentan dan Marginal

Masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak terlantar, lansia, serta kelompok rentan lainnya yang menjadi sasaran prioritas dalam pelaksanaan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan-Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah dan Faktor-Faktor yang mempengaruhinya

Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap isu strategi akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggungjawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Kecamatan Siantar Barat saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada Kecamatan Siantar Barat perumusan permasalahan pembangunan dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk menyesuaikan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam perumusan program dan kegiatan perangkat daerah, dalam pelaksanaannya terdapat pada beberapa permasalahan yang mempengaruhi tugas dan fungsi perangkat daerah dalam pelayanan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5.
Pemetaan Permasalahan Kecamatan Siantar Barat

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan	Masih kurangnya sarana dan prasarana, standar standar

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			pelayanan serta SDM dalam pelayanan
		Belum optimalnya pengelolaan kebersihan lingkungan	Masih Kurang maksimal sarana dan prasarana kebersihan

2.2.3 Isu Strategis

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Siantar Barat dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Siantar Barat yang teridentifikasi adalah Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan.

Tabel 2.6.
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	ISU KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tersedianya pelayanan administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan	Pelayanan publik belum optimal, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun pemanfaatan teknologi informasi	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Perdamaian keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	Transformasi tata kelola pemerintahan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Akuntabel, Transparan dan Kolaboratif	Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Siantar Barat berlandaskan pada RPJMD Kota Pematangsiantar Tahun 2025-2029 dengan berpedoman kepada visi yaitu “Membangun Pematangsiantar Cerdas, Sehat, Kreatif & Selaras”. Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Siantar Barat adalah misi Ke-5, yaitu Menata Sistem Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kecamatan Siantar Barat dalam rangka mendukung pencapaian misi Ke-5 ditetapkan tujuan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra (Tabel 3.3)

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN TARGET						
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Daerah			Nilai SAKIP	B	B	BB	BB	BB	A	
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Daerah		Indeks Pelayanan Publik	2,95	3,05	3,16	3,27	3,38	3,50	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93,00	94,00	94,50	95,00	95,50	95,80	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	64,64	65,00	71,00	71,50	72,50	80,05	
			Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	1	1	1	1	1	1	

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Kecamatan Siantar Barat (Tabel 3.4)

TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)	TAHAP VI (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pemanapan dasar pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas aparatur dan penataan sistem administrasi pelayanan kecamatan	Peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik dengan optimalisasi sarana prasarana dan pemanfaatan teknologi	Penguatan koordinasi lintas kelurahan serta pengembangan inovasi berbasis masyarakat	Penerapan sistem pelayanan terpadu dan digitalisasi layanan administrasi kecamatan	Evaluasi dan penyempurnaan sistem pelayanan publik menuju pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel	Konsolidasi hasil pelaksanaan program dan penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan daerah

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah cara atau usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif. Strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi dan arah kebijakan Kecamatan Siantar Barat Tahun 2025-2029 sesuai dengan misi Ke-5 RPJMD Kota Pematangsiantar disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3.
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Siantar Barat
(Tabel 3.5)

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik	Penguatan SAKIP Kota Pematangsiantar	Penguatan Nilai AKIP Perangkat Daerah	
2	Penguatan kelembagaan dan perbaikan sistem pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> - Penyesuaian standar pelayanan pada semua OPD berbasis SPM - Standarisasi prosedur pelayanan publik - Penguatan evaluasi layanan publik melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat yang terukur dan objektif 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan SOP pelayanan di kecamatan - Peningkatan pelayanan publik - Penguatan evaluasi dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat yang terukur dan objektif 	

Tabel 3.4.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan (Tabel T-C.26)

VISI	:	Membangun Pematangsiantar Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras		
MISI V	:	Menata Sistem Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan Standar Pelayanan Publik (SOP) 2. Peningkatan Fasilitas Penunjang 3. Penilaian Kepuasan terhadap Layanan 	Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik yang Responsif, Inovatif, Akses yang Cepat, dan Berbasis Teknologi Informasi Pengalokasian Anggaran untuk Program Skala Prioritas	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah daerah guna mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur. Pada kecamatan Siantar Barat terdapat program yang merupakan kegiatan untuk belanja rutin dan program yang menjadi prioritas urusan wajib.

Adapun rencana program Kecamatan Siantar Barat adalah sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Uraian Program dan Kegiatan yang direncanakan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif disajikan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Siantar Barat
(Tabel 4.2)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Daerah	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Daerah				Nilai SAKIP		
					Indeks Pelayanan Publik		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Perangkat Daerah			Nilai AKIP Perangkat Daerah		
					Jumlah Inovasi Perangkat Daerah		
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
			Meningkatnya Kebersihan di Lingkungan Kecamatan		Persentase Pembersihan dan Pengangkutan Sampah Lingkungan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
				Terlaksananya Kegiatan Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah di Lingkungan Kecamatan	Persentase Sampah yang Tertangani	Pengelolaan Sampah	
					Jumlah Sampah yang Tertangani Melalui Proses Pengangkutan	Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	
					Persentase Luas Layanan Pengumpulan Sampah	Penanganan Sampah Melalui Pengumpulan Sampah	
			Meningkatnya Kinerja Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
				Terfasilitasinya Kinerja Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten /Kota serta Pemberdayaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Masyarakat Hukum Adat	Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
			Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan		Nilai AKIP Perangkat Daerah Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan yang harus tersedia di Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pembayaran Gaji ASN	Persentase ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan		Persentase SKM Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Pelayanan yang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Efektif kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Keja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Persentase Kegiatan yang dilaksanakan Kelurahan berbasis Partisipasi Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan		Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di Wilayah Kecamatan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terfasilitasnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Siantar Barat
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				899.340.875		909.340.875		914.340.875		929.340.875		939.340.875		
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				899.340.875		909.340.875		914.340.875		929.340.875		939.340.875		
Meningkatnya Kinerja Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga (Persentase)	100	100	899.340.875	100	909.340.875	100	914.340.875	100	929.340.875	100	939.340.875		
2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				899.340.875		909.340.875		914.340.875		929.340.875		939.340.875	- KECAMATAN SIANTAR BARAT KOTA PEMATANG SIANTAR	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terfasilitasinya Kinerja Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	4	4	899.340.875	4	909.340.875	4	914.340.875	4	929.340.875	4	939.340.875		
2.13.05.2.01.0002 - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				899.340.875		909.340.875		914.340.875		929.340.875		939.340.875		
Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	4	4	899.340.875	4	909.340.875	4	914.340.875	4	929.340.875	4	939.340.875		
7.01 - KECAMATAN				12.478.266.759		12.490.659.125		12.560.659.125		12.620.659.125		12.810.659.125		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10.513.073.685		10.485.466.051		10.541.466.051		10.594.466.051		10.766.466.051		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	64,57	65	10.513.073.685	71	10.485.466.051	71,5	10.541.466.051	72,5	10.594.466.051	80,05	10.766.466.051	- KECAMATAN SIANTAR BARAT KOTA PEMATANG SIANTAR	
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah (Inovasi)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				17.318.964		22.318.964		22.518.964		24.518.964		27.518.964		
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	17.318.964	2	22.318.964	2	22.518.964	2	24.518.964	2	27.518.964		
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				17.318.964		22.318.964		22.518.964		24.518.964		27.518.964		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	17.318.964	2	22.318.964	2	22.518.964	2	24.518.964	2	27.518.964		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.635.819.413		5.142.119.413		5.142.119.413		5.152.119.413		5.172.119.413		
Tersedianya Pembayaran Gaji ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	67	67	7.635.819.413	67	5.142.119.413	67	5.142.119.413	67	5.152.119.413	67	5.172.119.413		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.635.819.413		5.142.119.413		5.142.119.413		5.152.119.413		5.172.119.413		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	67	67	7.635.819.413	67	5.142.119.413	67	5.142.119.413	67	5.152.119.413	67	5.172.119.413		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				366.959.444		444.791.724		454.791.724		470.991.724		504.791.724		
Tersedianya Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	366.959.444	4	444.791.724	4	454.791.724	4	470.991.724	4	504.791.724		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	34	37	38	39	40								
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				36.934.630	46.934.630	56.934.630	66.934.630	69.534.630						
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	36.934.630	46.934.630	56.934.630	66.934.630	69.534.630	4	4	4	4	4	
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				153.916.260	173.916.260	168.916.260	169.916.260	177.916.260						
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	153.916.260	173.916.260	168.916.260	169.916.260	177.916.260	4	4	4	4	4	
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				92.203.714	112.203.714	113.203.714	114.203.714	119.203.714						
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4	92.203.714	112.203.714	113.203.714	114.203.714	119.203.714	4	4	4	4	4	
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				29.997.000	34.997.000	37.997.000	40.997.000	45.997.000						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	29.997.000	4	34.997.000	4	37.997.000	4	40.997.000	4	45.997.000		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				18.907.840		21.740.120		21.740.120		21.940.120		25.140.120		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	18.907.840	4	21.740.120	4	21.740.120	4	21.940.120	4	25.140.120		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35.000.000		55.000.000		56.000.000		57.000.000		67.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	34	37	35.000.000	38	55.000.000	39	56.000.000	40	57.000.000		67.000.000		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				183.000.000		343.000.000		344.000.000		355.000.000		435.000.000		
Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	5	183.000.000	10	343.000.000	10	344.000.000	10	355.000.000	10	435.000.000		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	10		15		15		15		15			
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				53.000.000		133.000.000		133.000.000		143.000.000		173.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	5	53.000.000	10	133.000.000	10	133.000.000	10	143.000.000	10	173.000.000		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				130.000.000		210.000.000		211.000.000		212.000.000		262.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	10	130.000.000	15	210.000.000	15	211.000.000	15	212.000.000	15	262.000.000		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.925.493.896		1.981.573.946		1.984.373.946		1.987.173.946		1.999.373.946		
Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1.925.493.896	1	1.981.573.946	1	1.984.373.946	1	1.987.173.946	1	1.999.373.946		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12					12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.836.800		10.316.850		10.516.850		10.716.850		10.916.850		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	4.836.800	1	10.316.850	1	10.516.850	1	10.716.850	1	10.916.850		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				74.383.200		74.983.200		75.583.200		76.183.200		78.183.200		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		74.383.200		74.983.200	12	75.583.200	12	76.183.200	12	78.183.200		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.846.273.896		1.896.273.896		1.898.273.896		1.900.273.896		1.910.273.896		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.846.273.896	12	1.896.273.896	12	1.898.273.896	12	1.900.273.896	12	1.910.273.896		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				384.481.968		2.551.662.004		2.593.662.004		2.604.662.004		2.627.662.004		
Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	18	18	384.481.968	18	2.551.662.004	18	2.593.662.004	18	2.604.662.004	18	2.627.662.004		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	13	13		13		13		13		13			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1		3		3		3					
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					269.327.954		279.327.954		280.327.954		282.327.954		290.327.954	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	13	13		269.327.954	13	279.327.954	13	280.327.954	13	282.327.954	13	290.327.954	
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					16.634.050		66.634.050		67.634.050		71.634.050		81.634.050	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	18	18		16.634.050	18	66.634.050	18	67.634.050	18	71.634.050	18	81.634.050	
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					56.519.964		2.113.700.000		2.153.700.000		2.158.700.000		2.161.700.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2		56.519.964	2	2.113.700.000	2	2.153.700.000	2	2.158.700.000	2	2.161.700.000	
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					42.000.000		92.000.000		92.000.000		92.000.000		94.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	42.000.000	3	92.000.000	3	92.000.000	3	92.000.000		94.000.000		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.647.655.286		1.652.655.286		1.653.655.286		1.655.655.286		1.660.655.286		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan Kelurahan berbasis Partisipasi Masyarakat (%)	100	100	1.647.655.286	100	1.652.655.286	100	1.653.655.286	100	1.655.655.286	100	1.660.655.286	-	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.647.655.286		1.652.655.286		1.653.655.286		1.655.655.286		1.660.655.286		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	40	40	1.647.655.286	40	1.652.655.286	40	1.653.655.286	40	1.655.655.286	40	1.660.655.286		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	8	8		8		8							
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	16	16		16		16							
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				47.655.286		52.655.286		53.655.286		55.655.286		60.655.286		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	40	40	47.655.286	40	52.655.286	40	53.655.286	40	55.655.286	40	60.655.286		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	8	8	800.000.000	8	800.000.000	8	800.000.000	8	800.000.000	8	800.000.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	16	16	800.000.000	16	800.000.000	16	800.000.000	16	800.000.000	16	800.000.000		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				317.537.788		352.537.788		365.537.788		370.537.788		383.537.788		
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	317.537.788	100	352.537.788	100	365.537.788	100	370.537.788	100	383.537.788	- KECAMATAN SIANTAR BARAT KOTA PEMATANG SIANTAR	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				317.537.788		352.537.788		365.537.788		370.537.788		383.537.788		
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4	4	317.537.788	4	352.537.788	4	365.537.788	4	370.537.788	4	383.537.788		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	0	700		700		700		700		700			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	800	800		800		800		800		800			
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					176.089.558		191.089.558		201.089.558		203.089.558		208.089.558	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	800	800	176.089.558	800	191.089.558	800	201.089.558	800	203.089.558	800	208.089.558		
7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				0		10.000.000		11.000.000		13.000.000		18.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	0	700	0	700	10.000.000	700	11.000.000	700	13.000.000	700	18.000.000		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				141.448.230		151.448.230		153.448.230		154.448.230		157.448.230		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4	4	141.448.230	4	151.448.230	4	153.448.230	4	154.448.230	4	157.448.230		

Tabel 4.3.
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
7.01.2.13.2.11.02.0000 - KECAMATAN SIANTAR BARAT KOTA PEMATANGSIANTAR				
1.	2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya Kinerja Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.13.05.2.01.0002 - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
2.	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
3.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
4.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			<p>7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</p>	

4.4 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*out comes*) dan kegiatan (*out put*).

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan akhir pelaksanaan. Hal ini untuk mencamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra. Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Siantar Barat.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Siantar Barat (Tabel 4.5)

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	64,57	64,64	65,00	71,00	71,50	72,50	80,05	
2	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1	1	1	1	1	1	1	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase	85,00	93,00	94,00	94,50	95,00	95,50	95,80	

BAB V PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja. Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 2025-2029. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategi ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategik Kecamatan Siantar Barat Tahun 2025-2029 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kecamatan Siantar Barat.

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Siantar Barat kota Pematangsiantar yang disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematangsiantar tahun 2025-2029.

Selain itu Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tahun 2025-2029 merupakan suatu acuan unit kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Siantar Barat dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya.

**Pematangsiantar, September 2025
CAMAT SIANTAR BARAT**



**HERWAN A.R SARAGIH, SH
PENATA TK I
NIP. 19711225 2000604 1 008**